

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ERIKA FITRIANI

NIM : 10300113110

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)”, yang disusun oleh Erika Fitriani, NIM: 10300113110, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 M, bertepatan dengan 26 syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 20 Juli 2017 M.
26 Syawal 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan, Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada ilahi Rabbi Allah swt. berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)**. Kemudian, shalawat serta salam-Nya, mudah-mudahan terlimpah curah kepangkuan baginda Rasulullah saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis;
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku ketua program studi jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan juga selaku penguji 2;
4. Bapak Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing 1 yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Rahmiati, M.Pd selaku pembimbing 2 yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA selaku Penguji 1;
7. Sektor Panca Lautang, dan Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap yang telah memberikan tempat dan meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitian;
8. Abd.Salam yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang besar dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Teman seperjuangan sekaligus menjadi sahabat, Andi Irmayanti Patta, Siska;
10. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada almamaterku Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Samata, 1 Maret 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13-33
A. Teori Penegakan Hukum.....	13
B. Konsep Kriminologi.....	15
C. Konsep Pelanggaran Lalu lintas.....	20
D. Konsep Hukum Islam	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	35

D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	40-61
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	40
B. Situasi Kesatuan Wilayah Penelitian	45
C. Gambaran Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang di bawah Polres Sidrap	49
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang di bawah Polres Sidrap.....	54
E. Pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh	59
BAB V PENUTUP	62-64
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016.....	44
Tabel 2	Data Pelanggaran Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas dan Tilang Polres Sidrap di Wilayah hukum sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016.....	50
Tabel 3	Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap.....	51
Tabel 4	Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap..... ..	52
Tabel 6	Data Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap.....	53
Tabel 7	Data Penyebab kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah hukum sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten.....	43
Gambar 2	Struktur Organisasi Polsek Panca Lautang Kabupaten Sidrap.	46
Gambar 3	Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap.....	48



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitahu apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathahdanyaa'</i>	Ai	a dani
أَوْ	<i>fathahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	i	I dan garis di atas
أ	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيَّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيَّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnahqabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِذْنِ اللَّهِ *diinullah* بِبِلَااه *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadunillaarasul

Inna awwalabaitinwudi' alinnasilallazii bi bakkatamubarakan

Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus di sebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahuwata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Erika Fitriani
NIM : 10300113110
Judul : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan
Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas di pedesaan perspektif hukum Islam? Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana gambaran pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap?, dan 3) Bagaimana pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat?

Lokasi penelitian di lakukan di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang di bawah Polres Sidrap dengan menggunakan pendekatan Sosiologis Hukum. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah Kapolsek Panca Lautang, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Setelah rangkaian data tersebut terkumpul dilakukan analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas, profesi, pendidikan dan jenis kelamin merupakan penggambaran umum tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang. Jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang tahun 2016 sebanyak 239 pelanggaran dengan jumlah paling banyak dilakukan oleh laki-laki yang mayoritas berprofesi swasta dengan berpendidikan SMA. Data kecelakaan lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap di wilayah hukum Sektor Panca Lautang tahun 2016 sebanyak 20 orang masing-masing meninggal dunia sebanyak 6 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 13 orang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah pedesaan khususnya di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap ada dua, yaitu pertama faktor pengguna jalan meliputi: 1) Tidak patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan kata lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, 2) Adanya pemikiran masyarakat di daerah perkampungan bahwa jarak yang ditempuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak begitu jauh sehingga melanggar peraturan lalu lintas merupakan hal yang biasa. Kedua, yaitu dari aparat penegak hukumnya yang meliputi: 1) Kurang melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan dan kelancaran berkendara, 2) Kurang tegasnya aparat kepolisian terhadap pemberlakuan aturan lalu lintas tersebut. Adapun dalam pandangan Islam pelanggaran lalu lintas yaitu wujud dari ketidaktaatan terhadap pemerintah di mana bertentangan dengan QS al-Nisā/4:59. tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah. Selain itu salah satu akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas yaitu dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa sehingga bertentangan dengan QS al-Isrā/17:33. di mana dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik

nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas, yakni untuk tercapainya kemaslahatan.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam hal melakukan penertiban lalu lintas dan melakukan penyuluhan terkait pentingnya taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas, dan kepada para pengguna jalan agar berlalu lintas yang baik dan benar sehingga jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang akan mengalami penurunan setiap tahunnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada sebuah kalimat yang ada di dalam hukum, yaitu “manusia lahir dijemput oleh hukum, dibesarkan oleh hukum dan mati diantarkan hukum”. Begitulah bunyi dari kalimat tersebut yang pada intinya menekankan pada kita semua bahwa tidak ada manusia yang bisa melepaskan dirinya dari hukum tersebut. Kata hukum hanya terdiri dari lima suku kata namun memiliki arti yang begitu luas. Definisi hukum sampai saat ini masih belum disepakati oleh para ahli hukum, belum adanya kesepakatan para ilmunan hukum, karena terdapat kesulitan dalam mendefinisikan atau memberikan pengertian hukum.¹

Adapun dalam konsep Islam ada lima hal yang perlu dijaga dan dipelihara, yang juga merupakan tujuan hukum Islam yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta.² Islam datang untuk menjamin terpeliharanya lima hal yang primer tersebut. Dan itulah agama memberi aturan-aturan yang berkaitan dengan penjagaan lima hal primer ini, seperti kewajiban jihad, larangan membunuh, perintah menikah, larangan berzina, larangan mencuri, serta larangan membahayakan diri atau orang lain. Jadi sebagai seorang muslim wajib untuk mematuhi segala macam bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah, artinya bahwa tidak boleh seorang muslim melanggar peraturan tersebut karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya bagi dirinya

¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 13.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 7.

dan orang lain. Pemerintah membuat aturan-aturan tersebut tentunya sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan maslahat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah mudharat. Allah berfirman dalam QS al-Nisā/4:59. tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali berkewajiban menaati pemerintah.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara hukum tentu adanya pembatasan oleh hukum artinya bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh warga Negara ataupun penguasa harus berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan sebagai landasan dan strategi Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan.

³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali, 2014), h. 87.

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan diberbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Pembangunan diberbagai bidang tersebut menyangkut sarana maupun prasana. Termasuk dalam bidang perhubungan, khususnya lalu lintas.

Kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini masih jauh dari kata tertib terutama di pedesaan. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah bingung akan menangani ketertiban dalam berlalu lintas. Sehingga pemerintah membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya, yaitu UU NO. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diharapkan dapat membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas. Tetapi pada praktik keseharian masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Khususnya di pedesaan kedisiplinan dalam berlalu lintas masih sangat rendah.

Pada dasarnya untuk mencapai tujuan hukum penyelesaiannya mudah, sepanjang para penegak hukum berperan aktif dalam melakukan pembenahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran sering dilakukan akibatnya, kelalaian tersebut tidak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan meninggal dunia.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berimplikasi pada munculnya gangguan KAMTIBMAS adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan menurunnya keamanan dan ketertiban lalu lintas yang akan berakibat pada terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sejauh ini pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya

kecelakaan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang cenderung tidak tertib, mengabaikan keselamatan dirinya dan orang lain, serta sikap-sikap yang mendukung pelanggaran. Demikian pula dengan anggota masyarakat khususnya di pedesaan yang dalam kesehariannya juga berlalu lintas sebagai kebutuhan transportasi tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Perkembangan lalu lintas tersebut dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Perkembangan tersebut tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat. Melihat masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi. Rendahnya kesadaran masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas tentu menjadi harapan bagi semua. Namun, seiring perkembangan waktu, permasalahan lalu lintas semakin kompleks. Pengetahuan dan etika dalam berlalu lintas masih belum tercermin di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap. Merubah perilaku dalam masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya trobosan kreatif dan diperlukan suatu kesabaran dan kerja keras. Untuk itu perlu adanya kerja sama setiap komponen baik itu masyarakat dan penegak hukumnya untuk mewujudkan agar lalu lintas aman, nyaman dan tertib dimulai dari lingkup kecil yaitu lingkup desa.

Terdapat kaidah dasar bahwa hukum yang tidak ditegakkan lebih buruk daripada ketiadaan hukum. Peraturan lalu lintas yang baik namun tidak ditegakkan akan kehilangan wibawanya dan dapat berujung pada kekacauan dalam operasi lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di pedesaan Perspektif Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

a. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

b. Pelanggaran Lalu lintas

Adapun definisi dan pengertian pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah “perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas.”⁵

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁶

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 9.

⁵Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 18

⁶Mohamamad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42.

Baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).

2. Deskripsi Fokus

- a. Pengertian Kriminologi;
- b. Objek Studi Kriminologi;
- c. Teori-teori Kriminologi;
- d. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas;
- e. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas;
- f. Korelasi Hukum Islam dan Pelanggaran Lalu lintas;
- g. Hukum Islam dan Perlindungan Jiwa.

Tabel

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Kriminologi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Kriminologi b. Objek Studi Kriminologi c. Teori-teori Kriminologi
2.	Pelanggaran Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas b. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas
3.	Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> a. Korelasi Hukum Islam dan Pelanggaran Lalu lintas b. Hukum Islam dan Perlindungan Jiwa

Sumber: Hasil kajian penulis, 2016

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan pokok mengenai “Bagaimana Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di pedesaan Perspektif Hukum Islam?”

Permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa sub-masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat?

D. *Kajian Pustaka*

1. Faramita Nuriya Sari dalam jurnalnya “Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda”. Adapun isi ringkas dari jurnal ini di mana peran polisi lalu lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu Lintas di Kota Samarinda adalah masih kurang berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas dan kinerja polisi lalu lintas yang masih belum maksimal. Adapun faktor penghambat dalam peran polisi lalu lintas menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Samarinda masih kurangnya sosialisasi polisi lalu lintas kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat tertib terhadap lalu lintas dan butuh waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁷ Dalam jurnal ini cukup memberikan gambaran mengenai peran polisi lalu lintas dalam menangani penertiban masyarakat dalam berlalu lintas sedangkan pada penelitian saya lebih berfokus pada sebab-sebab terjadinya

⁷Faramita Nuriya Sari, “Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas di Kota Samarinda,” Ilmu Administrasi Negara, vol. 4 no. 3 (Agustus 2016), h. 1.

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di pedesaan dan juga menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Putu Willy Oki Pratiwi dalam jurnalnya “Pelanggaran Lalu lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilakukan Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama (studi kasus pada wilayah Polres Kabupaten Tabanan, di Kota Tabanan)”. Adapun isi ringkas dari jurnal ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya 1) menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas. 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan administrasi, 3) Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh pihak satuan lalu lintas Polres Kota Tabanan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dianggap belum maksimal upaya yang dilakukan yakni preventif dan refresif. Alternatif dari pihak kepolisian disini yaitu untuk menanggulangi atau mengurangi siswa/siswi SMP yang membawa sepeda motor ke sekolah dengan cara masyarakat, kepolisian, guru serta orang tua siswa/siswi bersatu untuk sama-sama bekerja sama memberantas siswa/siswi yang membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah.⁸ Jurnal ini lebih bersifat spesifik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan

⁸Putu Willy Oki Pratiwi, “*Pelanggaran Lalu lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dilakukan oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama*,” vol. 2, No.1 (2014), h.1.
<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/3546> (Diakses 10 November 2016)

pada penelitian saya lebih berfokus pada sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di pedesaan dan juga menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas.

3. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya “Kriminologi”. Adapun isi ringkas dalam buku ini di mana kriminologi merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.⁹ Para ilmuwan sejak jaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan. Dalam buku ini memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, obyek studi kriminologi, dasar dan teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis dan disiplin ilmu lainnya.
4. Leksmono Suryo Putranto dalam bukunya “Rekayasa Lalu lintas”. Adapun isi ringkas dalam buku ini di mana rekayasa lalu lintas adalah cabang ilmu dalam teknik sipil yang mempelajari metode perancangan ruang lalu lintas yang aman, nyaman, dan efisien. Pengemudi, kendaraan, pejalan kaki dan jalan adalah empat unsur utama dalam transportasi jalan raya. Keempat unsur tersebut saling terkait satu sama lain. Survey lalu lintas merupakan upaya observasi lapangan yang sangat penting sebagai dasar perencanaan, perancangan maupun evaluasi ruang

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.1.

lalu lintas.¹⁰ Dalam buku ini mempelajari tentang metode perancangan lalu lintas jalan raya yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan yang efisien dari sudut pandang pembiayaan dan penggunaan jalan.

5. Dede Rosyada dalam bukunya “Hukum Islam dan Pranata Sosial”. Adapun isi ringkas dalam buku ini memperlihatkan bahwa umat Islam mewarisi dua hal penting, yaitu al-Qur’an dan al-sunnah sebagai sumber ajaran, dan sejarah dinamika kajian hukum yang telah dilakukan para ulama tempo dulu, beserta seperangkat produk-produk pemikirannya dan teori-teori kajian hukum mereka. Sejarah ini memperlihatkan bahwa proses penerapan Islam itu, perlu analisis nalar kaum terdidik, karena doktrin-doktrin al-Qur’an dan al-sunnah itu bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan setelah habisnya masa risalah Muhammad, sementara dinamika sosial telah melahirkan perubahan-perubahan besar dalam tata kehidupan umat Islam sendiri. Proses aplikasi ajaran-ajaran Islam terhadap berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah inilah yang menuntut dilakukannya kajian *ijtihad*.¹¹ Dalam buku ini mempelajari tentang *Syari’ah dan Fiqh*, Hukum Islam dan pembagiannya, sumber Hukum Islam dan Metodologi Kajian Hukumnya, Ruang Lingkup *Fiqh* Islam, tentang Ilmu *Ushul Fiqh*, tentang *Ijtihad*, Rasionalisme dan Tradisionalisme dalam *Ijtihad*, *Madzhab-madzhab* dalam *Fiqh* Islam, Pranata Sosial, Modernisme dalam Hukum Islam, dan Modernisme dalam Pranata Sosial.

¹⁰Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu lintas* (Cet. III; Jakarta Barat: Indeks, 2016), h. 66.

¹¹Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 199.

E. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan tugas akhir dengan tujuan dan kegunaan:

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di pedesaan Perspektif Hukum Islam

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui gambaran pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap;
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap;
- 3) Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat.

2. Kegunaan

Manfaat akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, untuk menaati segala peraturan yang ada khususnya tentang peraturan lalu lintas.

Manfaat praktis, yakni sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap penerapan perpolisian masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Kepolisian Lalu lintas, sehingga menjadi kontribusi bagi satuan kepolisian

lalu lintas di Polres Sidrap maupun Polres lainnya sebagai bahan pembandingan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

Dalam skripsi ini terdiri dari teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam bab pembahasan. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah meliputi Teori Penegakan Hukum. Adapun konsep yang digunakan meliputi Konsep Kriminologi, Konsep Pelanggaran Lalu Lintas, dan Konsep Hukum Islam kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas.

A. *Teori Penegakan Hukum*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan atau menegakkan. Penegakan Hukum adalah yang menegakkan hukum.¹

Menurut Soerjono Soekanto secara teoretis penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dikatakan selanjutnya bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut.² Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹M Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 1980), h. 912.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 3.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja yang meliputi undang-undang yang mendukung kinerja Satuan lalu Lintas Polres Sidrap dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini adalah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum supaya kinerja Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dapat melaksanakan tugas lebih baik;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kesadaran masyarakat masih rendah terhadap peraturan berlalu lintas;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalamnya.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu maka sehubungan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas guna mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan teratur sebagaimana mestinya dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Konsep Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.³ Oleh Karena kejahatan merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial maupun menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-yuridis bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.⁴

Adapun pengertian dari kriminologi ialah

*The term criminology, literally, "the study of crime," originated with the French anthropologist Topinard in 1879. While criminologist sometimes disagree regarding a proper definition of the field, criminology is generally defined as the science or discipline which studies crime and criminal behavior. So, criminology is the science or discipline which studies crime and criminal behavior, etiology (or theories of crime causation), the sociology of law and societal reaction, related areas include juvenile delinquency and victimology.*⁵

Adapun terjemahan dari pengertian kriminologi di atas ialah

Istilah kriminologi adalah "studi kejahatan" berasal dari antropolog Topinard Perancis pada tahun 1879, kriminologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku Kriminal. Jadi, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan, sebab-sebab kejahatan, dan reaksi kejahatan."⁶

³Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles Of Criminology* (Cet. IX; Philadelphia, New York Toronto: 1974), h. 18.

⁴Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Armico, 1999), h. 9.

⁵Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology* (America: Reprinted, 1889), h. 2.

⁶Frank E. Hagan, Terj. Penulis, *Introduction to Criminology*, h. 2.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi diantaranya:⁷

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, dan reaksi terhadap pelanggaran itu.⁸

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁹

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁰

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹¹

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 9.

⁸W. M. E. Noach, Terj. J. E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 7.

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 12.

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 12.

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h. 12.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹²

Dari pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan, dan cara menanggulangi kejahatan.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.¹³

Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.12.

¹³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 74.

itu berada; *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.¹⁴

2. Objek Studi Kriminologi

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁵

Ketiga objek kriminologi tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

3. Teori-teori “Kriminologi baru” atau “Kriminologi Kritis”

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya hukum pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan.¹⁶

Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat.¹⁷

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 13-14.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, h.12.

¹⁶William J. Chambliss, *Toward A Radical Criminology*, dalam David Kairys, ed., *The Political Of Law. A. Progressive Critique* (New York: Pantheon Books, 1890), h. 230.

¹⁷William J. Chambliss, *Toward A Radical Criminology*, dalam David Kairys, ed., *The Political Of Law. A. Progressive Critique* (New York: Pantheon Books, 1890), h. 230.

Di dalam tulisannya, William J. Chambliss menjelaskan bahwa perspektif teoretik yang menyertai pertanyaan mengapa sejumlah orang melakukan kejahatan membawa pada pandangan tentang kebudayaan norma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan sebagai dasar pembentukan perilaku dan dengan begitu mengingkari struktur politik dan ekonomi. Ia menganjurkan untuk menggunakan metodologi dialektik dan teori tentang kontradiksi-kontradiksi struktural sebagai titik tolak kriminologi yang terpadu. Secara ringkas posisi ini menegaskan bahwa di dalam setiap sistem ekonomi dan politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar dan orang bertindak secara sadar walaupun dihambat oleh warisan tradisi, kepercayaan, pranata-pranata yang ada untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi ini.¹⁸

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio-struktural, Richard Quinney mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi;
- b. Defenisi-defenisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan;
- c. Defenisi-defenisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana;

¹⁸William J. Chambliss, *Toward A Radical Criminology*, dalam David Kairys, ed., *The Political Of Law. A. Progressive Critique*, h. 230.

¹⁹Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Kejahatan*, h. 36-37.

- d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang-orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan;
- e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya;
- f. Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini.

C. Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri. Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran.

Menurut pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas. Adapun definisi dan pengertian pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan

pelanggaran lalu lintas jalan adalah “perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas.”²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1 Juta (Pasal 281);
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2);
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 282);
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dapat dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 285 ayat 1);
5. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 285 ayat 2);
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan

²⁰Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 18.

- pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 278);
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1);
 8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 5);
 9. Setiap pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1);
 10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 289).

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, maka diharapkan adanya kepatuhan hukum masyarakat seiring adanya penjatuhan sanksi yang dapat membuat efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan).

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri, diharapkan dapat membuat kondisi lalu lintas menjadi aman dan tertib serta membuat efek jera bagi pelanggar, sehingga terciptanya kepatuhan lalu lintas.

D. Konsep Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Istilah-istilah tersebut yaitu, (1) hukum, (2) *hukm dan ahkam*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqh atau fiqh* dan beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.²¹

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.²²

Di samping itu, ada konsepsi lain, di antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.²³

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.²⁴

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 42.

²²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 43.

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 43.

²⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 44.

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *jā'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib* dan (5) *haram*.²⁵

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga lima kategori hukum atau lima jenis hukum ini, disebut juga hukum *taklifi* yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan disebut *jā'iz* atau *mubah* atau *ibahah*. Mungkin juga hukum *taklifi* itu mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (*sunnah*). Mungkin juga mengandung kaidah yang seyogianya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (*makruh*). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardu* atau *wajib*), dan mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*).²⁶

Selain dari perkataan hukum, *hukm* dan *al-ahkam al-khamsah* atau *hukum taklifi* di atas, perlu dipahami juga istilah *syariat*. Yang dimaksud dengan *syariat* atau ditulis juga *syariah*, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syariat* merupakan jalan hidup muslim. *Syariat* memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²⁷

²⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 44.

²⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 45.

²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 46.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam *al-Qur'an* dan di dalam kitab-kitab Hadis.²⁸

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al-Qur'an* itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang masih bersifat umum itu perlu diperinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan ke dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syariat dimaksud. Ilmu tersebut dinamakan ilmu *fiqh* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (*fiqh*) Islam. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang ditulis fiqih setelah di Indonesiakan, artinya paham atau pengertian. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al-Qur'an* dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.²⁹

²⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 47.

²⁹Mohamamad Daud Ali, *Hukum Islam* , h. 47.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni (1) *Syariat* Islam dan (2) *Fiqh* Islam.

Sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. *Al-Qur'an*
2. Hadis Rasulullah saw.
3. *Ijtihad ulilamri*

Berdasarkan QS al-Nisa/4:59 ijtihad ulil amri dapat diperluas menjadi:

1. *Qias*
2. *Ijma'*
3. *Istisnaa*
4. *Istishab*
5. *Musalah wal mursalah*, dan
6. *Urf*

Sumber hukum Islam yang pertama adalah *al-Qur'an*. *Al-Qur'an* merupakan kumpulan wahyu Allah swt. yang disampaikan kepada umat dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. *al-Qur'an* sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Penjelasan dari *al-Qur'an* ini selalu didapati dalam sunah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam *al-Qur'an*.³⁰

Jika suatu nas hukum tidak didapati dalam *al-Qur'an* atau sunah barulah dipergunakan *ijma'*, yaitu pendapat ulama-ulama atau *ijtihad*, pendapat seorang ulama atau dengan *qias*, membanding sesuatu dengan yang sudah pasti hukumnya.³¹

³⁰Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, h. 45.

³¹Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 118.

Jadi dalam agama Islam pikiran setiap manusia berhak dipergunakan sebaik-baiknya.

Kalau bagian-bagian hukum Islam disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:³²

Hukum perdata (Islam) adalah (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan; (3) *muamalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.³³

Hukum publik (Islam) adalah (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya akan ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (5) *ah-ahkam as-sulthaaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya; (6) *siyaar* mengatur urusan perang dan

³²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 56.

³³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 57.

damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara Lain; (7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.³⁴

1. Korelasi Hukum Islam dan Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum adalah produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia ketuhanan, karena tidak ada hukum yang tak membantu tata tertib dunia ketuhanan.³⁵

Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah *al-Qur'an* yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan *al-ra'yu*. Agama Islam pun bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, baik agama Islam maupun hukum Islam, kedua-duanya bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Adapun *al-ra'yu* sebagai hasil *ijtihad* (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam.³⁶

Seorang ahli hukum adat dan hukum Islam yang semasa hidupnya menjabat Guru Besar untuk kedua mata kuliah itu di Universitas Indonesia, Hazairin telah menyanggah pandangan barat yang memisahkan hukum dari agama dengan argument sebagai berikut:

“...hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya bertakluk kepada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari hubungan antar manusia dengan manusia yang dengan demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai pula mau tak mau perhubungan dengan roh dengan Roh Akbar, yakni perhubungan dengan dengan Tuhannya yang Maha Esa kepada siapa tergantung hidup matinya, demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatannya.

³⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, H. 57.

³⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003), h. 60.

³⁶Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 61.

Menurut paham ini masyarakat manusia itu bukan urusan manusia saja, tetapi juga menjadi urusan sang Penjelma manusia itu sendiri, sehingga pergaulan hidup sesama manusia itu bukanlah merupakan perhubungan antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia dan Tuhannya bersama itu”.³⁷

Lebih lanjut Hazairin menegaskan, apabila hukum dilihat dari sudut keadilan, menurut Hazairin “sekalipun telah diatur sebaik-baiknya belumlah ia merupakan suatu paparan keadilan, tetapi barulah memberikan pegangan-pegangan pokok bagi mencapai keadilan”, ini berarti kemampuan manusia sangat terbatas untuk dapat mengaplikasikan keadilan secara ideal. Hazairin melukiskan bahwa manusia itu bersifat lemah, meskipun ia seorang filosof atau guru besar terkenal:

“Dia tidak sanggup merangkum dalam proses pemikiran dan pertimbangannya semua hal-hal, semua hubungan-hubungan, semua kemungkinan-kemungkinan, baik untuk kini apalagi untuk waktu yang akan datang”.³⁸

Dengan alasan ini, Hazairin menegaskan mengapa QS. al-Nisā/4:59. memerintahkan kepada manusia untuk mentaati (mematuhi) ketetapan-ketetapan Allah, Rasulullah dan *ulilamri* yaitu “penyelenggara Negara” atau “pengelola Negara”. Dalam konteks ini, antara lain dapat diamati betapa eratnya hubungan antara hukum dan *al-din al-islami*.³⁹

Jadi hubungan antara pemerintah dan rakyat, *al-Qur'an* telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam QS al-Nisā/4:59.

³⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 61.

³⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 62.

³⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 62

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Dengan perkataan lain selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁴⁰

Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain.

Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al-Isrā/17:33.

Dalam QS al-Isrā/17:33. dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara. Perlu segera dipahami

⁴⁰T. M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 437-439.

bahwa dalam Negara hukum menurut *al-Qur'an* dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun “hak untuk mati” sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.⁴¹

2. Hukum Islam dan Perlindungan Jiwa

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴² Terkait dengan penjagaan lima hal tersebut agama memberikan aturan-aturan seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, dan larangan membahayakan diri dan orang lain.

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā/4:93. sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahnya:

⁴¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 132.

⁴²Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 68.

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁴³

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain.

Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya, termasuk bunuh diri sendiri. Meskipun tampaknya bunuh diri itu merupakan tindakan yang paling kurang risikonya terhadap orang lain, namun tetap diancam keras oleh Tuhan sebagai suatu tindakan yang aniaya.⁴⁴

Melindungi kehidupan merupakan hak asasi manusia, sekaligus menjadi kewajiban asasi menurut syariat. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, nilai insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai komunitas dalam suatu lingkungan yang damai dan tenteram, tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu pembunuhan adalah bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.⁴⁵

Dengan demikian, tidaklah benar atau tidaklah masuk akal bagi manusia untuk menya-nyiakan hidupnya dengan memuaskan nafsu-nafsu jasmaniah yang fana dan mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang sekejap saja.

⁴³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali, 2014), h. 93.

⁴⁴Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 69.

⁴⁵Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 70.

Hidup harus diabdikan demi pencarian untuk menyadari tujuan yang dipikulkan kepada hidup itu sendiri oleh sang pemberi hidup.⁴⁶

Setiap amal yang disyariatkan Tuhan tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar terlaksana secara formal, tetapi bermaksud untuk tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, segala perintah, larangan dan *takhyir* (pilihan) dalam hukum Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan untuk manusia, Tuhan sendiri tidak berkepentingan untuk suatu tujuan bagi dirinya.⁴⁷

Dalam hal berlalu lintas, pengguna jalan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut tentunya akan berorientasi kepada kemaslahatan rakyat.

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi.⁴⁸ Dalam berlalu lintas misalnya, adanya rambu-rambu lalu lintas, dan penggunaan helm bagi kendaraan roda dua, dan penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat tentunya untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan diri.

⁴⁶Ali Unal, Terj. Sugeng Hariyanto, Fathor Rasyid, *Makna Hidup Sesudah Mati* (Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

⁴⁷Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 61.

⁴⁸Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 148.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.¹ Dengan demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang keadaan yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang di bawah wilayah Polres Sidrap Kabupaten Sidrap.

¹Lexy J. Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian dengan pendekatan sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum yang sosiologis, terdiri dari:²

- a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi :
 - 1) Penelitian efektivitas hukum;
 - 2) Penelitian dampak hukum.
- b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis

Melalui pendekatan sosiologis hukum mengkaji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiologis hukum tertuju pada masalah efektivitas hukum.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian.

Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari 4

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

sumber informasi antara lain: Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan aparat kepolisian. Adapun *key informan* tersebut adalah:

- a. Kapolsek Panca Lautang, dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi tata tertib lalu lintas;
- b. Kepala Satuan Lalu lintas Polres Sidrap/Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas, sebagai penyelenggara/Pembina dalam penertiban lalu lintas, dengan maksud untuk mengetahui efektifitas pemberlakuan peraturan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Sektor Panca Lautang, serta kendala yang dihadapi;
- c. Masyarakat dan tokoh masyarakat yang menjadi pengguna jalan dan pelaksana peraturan lalu lintas, dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran masyarakat tentang arti penting kesadaran hukum khususnya mengenai tata tertib lalu lintas, kendala-kendala yang dihadapi, dan akibat dari perbuatan tersebut;
- d. Tokoh Agama yang menjadi pengguna jalan dan juga merupakan pelaksana peraturan lalu lintas, dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang ada, akibat dari pelanggaran lalu lintas atau ketidaktaatan masyarakat terhadap pemerintah atau aturan lalu lintas tersebut.

Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi yang akan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama diperoleh melalui Sektor Panca Lautang, Satuan lalu lintas Polres Sidrap dan unit-unit di dalamnya sehingga diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang sebab-sebab pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum

Sektor Panca Lautang. Selain itu, penelitian ini juga mencari data/informasi dari sumber-sumber lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen.

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan lain-lain.

Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, informan, topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.³

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*) di mana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau terperinci.

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 73.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴

c. Telaah dokumen

Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.

Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.

5. Instrumen Penelitian

Merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk mengambil data sebagai operasional metode. Dalam melakukan penelitian, menggunakan beberapa instrumen antara lain seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi dan alat tulis.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan data, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian.

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. II; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118.

menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

7. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan masalah dengan jawaban atau hasil wawancara.

Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.⁵

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 264.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Dari hasil pengumpulan data selama penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Sektor Panca Lautang di bawah wilayah Polres Sidrap Kabupaten Sidrap dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, telah diperoleh hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data ini dapat membantu penulis untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun uraian mengenai deskripsi penelitian tersebut, meliputi penjelasan tentang Kabupaten Sidrap, wilayah Hukum Kecamatan Panca Lautang, Sektor Panca Lautang, dan Satuan Lalu lintas Polres Sidrap tahun 2016 yang menggambarkan tentang :

1. Letak Wilayah Geografis Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang sering disingkat dengan nama Sidrap adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Letak Sidrap berada pada posisi 3° 43'- 4° 09', LS dan antara 119° 41'- 120° 10', BT dengan luas wilayah seluruhnya 1.883,25 km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan di Kabupaten Sidrap di antaranya, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Maritenggae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti,

Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase.

Sedangkan batas daerah Kabupaten Sidrap terdiri atas sebelah utara, timur, selatan, dan barat:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng;
- d. Sebelah Barat : Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Sidrap sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46,72 %), berbukit seluas 290.17 km² (15.43 %), dan bergunung seluas 712.81 km² (37,85 %). Keadaan alamnya juga sangat subur, terbukti bahwa Kabupaten Sidrap merupakan salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Hal ini terutama didukung oleh jaringan irigasi teknis yang mampu mengairi sawah sepanjang tahun.

Wilayah hukum Polres Sidrap terdiri dari 11 Sektor: Sektor Panca Lautang, Sektor Maritenggae, Sektor Sidenreng, Sektor Panca Rijang, Sektor Kulo, Sektor Baranti, Sektor Watang Pulu, Sektor Tellu Limpoe, Sektor Dua Pitue, Sektor Pitu Riawa, dan Sektor Pitu Riase.

Kecamatan Panca Lautang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Sidenreng Rappang yang menjadikan Kelurahan Bilokka sebagai pusat pemerintahannya. Panca Lautang mempunyai luas wilayah sekitar 153,93 km² dengan topografi berupa dataran (73 %), berbukit (15,5 %), dan bergunung

(10,0%). Secara Administratif pemerintah, pembagian wilayah kota Sidrap di Kecamatan Panca Lautang terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu :

1. Cenrana, terdiri dari 3 Dusun, 4 RW, dan 8 RT;
2. Bapangi, terdiri dari 3 Dusun, 5 RW, dan 9 RT;
3. Wanio Timoreng, terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 8 RT;
4. Wanio, terdiri dari 3 Dusun, 5 RW, dan 11 RT;
5. Bilokka, terdiri dari 2 Lingkungan, 5 RW, dan 12 RT;
6. Corawali, terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 8 RT;
7. Lise, terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 8 RT;
8. Alesalewo, terdiri dari 2 Dusun, 4 RW, dan 8 RT;
9. Lajongan, terdiri dari 2 Lingkungan, 6 RW, dan 8 RT;
10. Wette'e, terdiri dari 2 Lingkungan, 6 RW, dan 16 RT.

Jadi banyaknya Lingkungan, Dusun, RW, dan RT menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Panca Lautang meliputi, 6 Lingkungan, 17 Dusun, 50 RW, dan 96 RT yang masing-masing berada di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

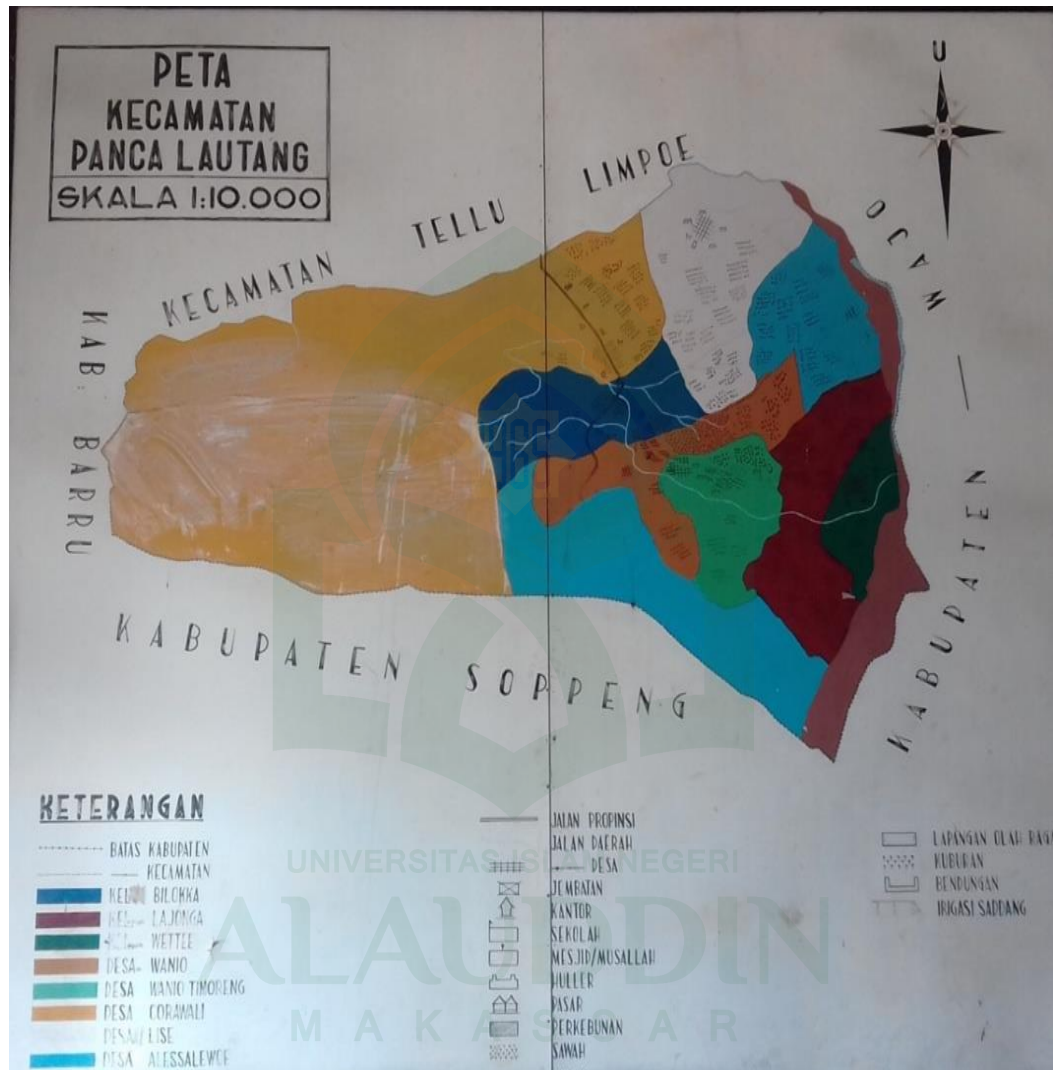
Kecamatan Panca Lautang terbentuk sejalan dengan berlakunya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, dengan kepala Pemerintahan (Camat) pertama adalah Andi Habib Hindi.

Adapun batas Wilayah Kecamatan Panca Lautang adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng
2. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Danau Tempe
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pare-Pare

Gambar 1

Peta Wilayah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap



Sumber : Kantor Kecamatan Panca Lautang

2. Demografi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Sidrap hingga saat ini sebanyak 277,451 jiwa. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Cenrana	152	752	29,35	25,6
2.	Bapangi	374	1.473	20,45	72,0
3.	Wanio Timoreng	533	2.213	8,82	250,1
4.	Wanio	489	1.754	8,59	204,2
5.	Bilokka	700	2.716	12,43	218,5
6.	Corawali	498	1.975	28,35	69,7
7.	Lise	585	2.260	13,50	167,4
8.	Alesalewo	205	869	16,37	53,1
9.	Lajonga	278	1.215	6,25	194,4
10.	Wette'e	506	2.015	9,82	205,2
JUMLAH		4.320	17.242	153,93	1.460,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Sidrap Tahun 2016

Secara demografi jumlah penduduk di Kecamatan Panca Lautang memiliki jumlah penduduk sebanyak 17.242 jiwa dengan komposisi adalah: jumlah penduduk pria 8.364 jiwa, dan jumlah penduduk wanita 8.878 jiwa.

B. Situasi Kesatuan Wilayah Penelitian

1. Situasi Umum Sektor Panca Lautang

a. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap yaitu Polri yang mampu memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat serta Penegak Hukum yang Profesional dan Proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang, yang pada akhirnya terwujudlah Polisi yang dicintai dan dipercaya oleh masyarakat.

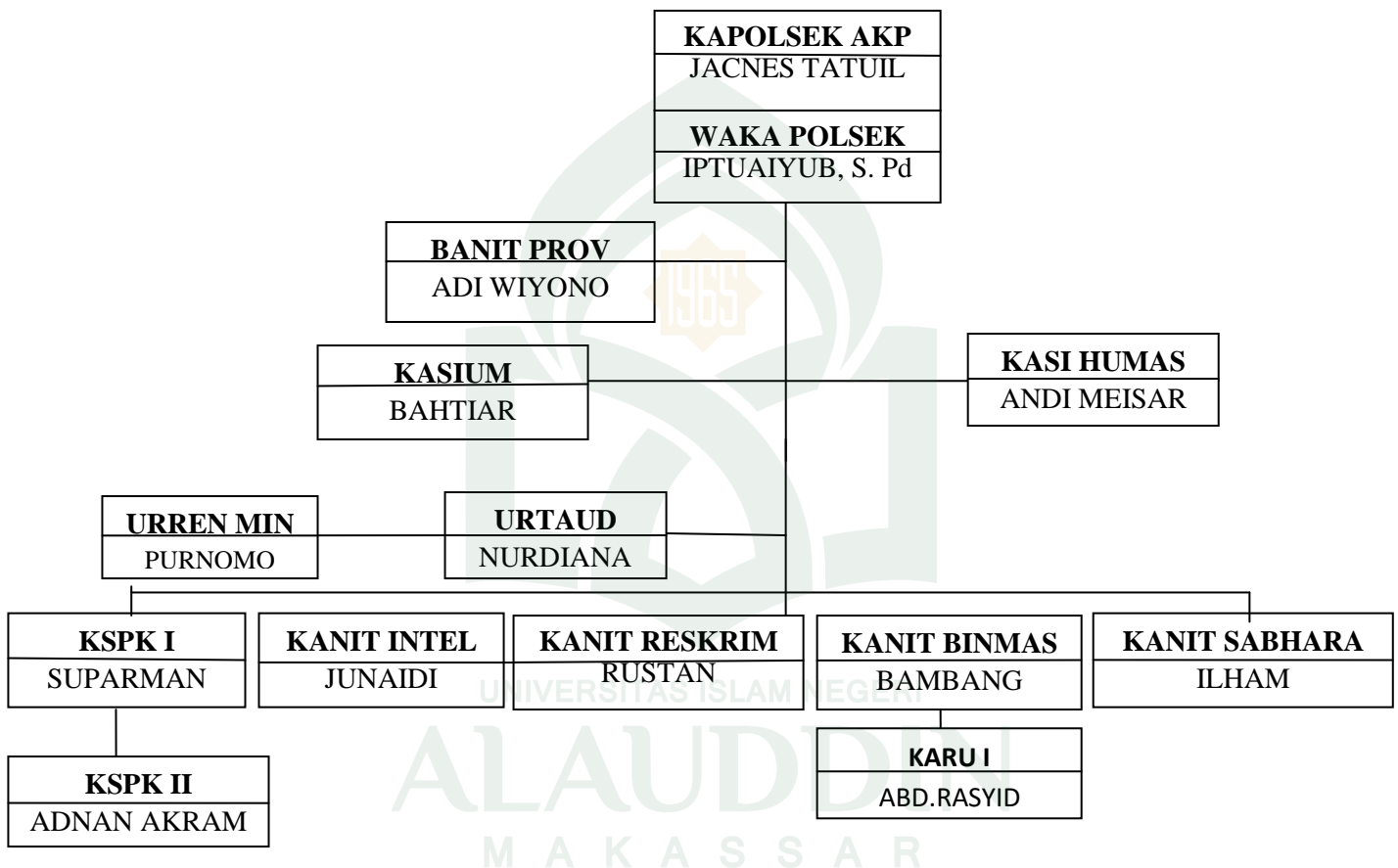
Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polsek Panca Lautang kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).

b. Struktur Organisasi

Gambar 2

Struktur Organisasi Polsek Panca Lautang Polres Sidrap



Sumber : Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Sektor.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka setiap usaha, pekerjaan dan kegiatan yang ingin dicapai perlu disusun dalam satuan struktur organisasi Satuan Polsek Panca Lautang, yang dapat digambarkan seperti bagan di atas.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Huruf A merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas:

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajaran termasuk kegiatan pengamanan;
2. Memberikan sarana pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam Sektor Panca Lautang secara khusus tidak terdapat fungsi yang menangani bagian Lalu lintas, namun mereka hanya melakukan penanganan awal setelah itu diserahkan ke bagian yang berwenang untuk melakukan tindakan lanjut yaitu Lalu lintas Polres Sidrap. Sebagaimana Kapolsek Panca Lautang mengatakan bahwa “Data pelanggaran lalu lintas itu pasti ada cuma itu setiap pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas itu datanya ada di Polres Sidrap (lalu lintas)”.¹

c. Situasi KAMTIBMAS di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang

Berdasarkan data yang diperoleh, dari data tersebut terdapat kerawanan-kerawanan kriminalitas yang menonjol diantaranya yaitu: kecelakaan lalu lintas, mabuk-mabukan, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan.

2. Situasi Umum Lalu Lintas Polres Sidrap

Situasi umum Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap menggambarkan struktur organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap.

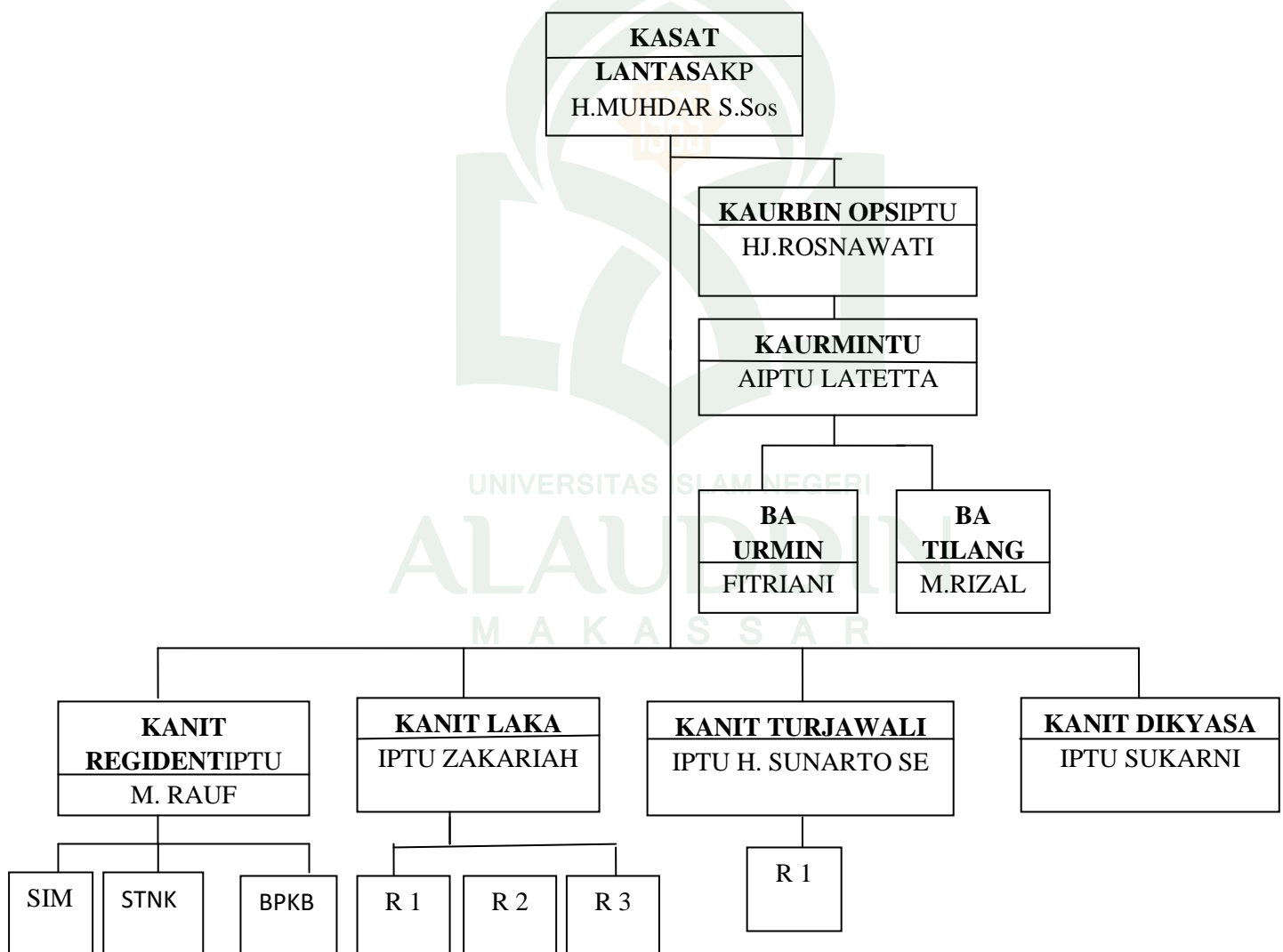
¹Jacnes Tatuil, Kapolsek Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 9 Januari 2017.

a. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap menggambarkan pembagian tugas (*job description*) masing-masing satuan dan fungsi pada bidang lalu lintas. Selanjutnya dapat dilihat struktur organisasi Satuan Lalu lintas Polres Sidrap sebagai berikut.

Gambar 3

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap



Berdasarkan struktur organisasi di atas, Satuan lalu lintas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas yang disingkat Kasat Lantas. Kasat Lantas selaku penanggung jawab pelaksana tugas bidang lalu lintas bertanggung jawab kepada Kapolres dan dibantu oleh seorang Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Lalu Lintas, yang kemudian disingkat Kaur Bin Ops dan beberapa Kepala Unit yang disingkat Kanit yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan serta TAUD lantas dalam bidang administrasi dan ketatausahaan.

C. Gambaran Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang di bawah Polres Sidrap

1. Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang di bawah Polres Sidrap

Gambaran umum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap, maka data-data atau fakta mengenai jenis pelanggaran lalu lintas, profesi, pendidikan, dan jenis kelamin. Hal tersebut tentunya merupakan gambaran umum pelanggaran lalu lintas yang menggambarkan tentang kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Panca Lautang bahwa:

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kondisi ini tentunya juga akan mempengaruhi proses penegakan hukum bidang lalu lintas.²

²Jacnes Tatuil, Kapolsek Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 9 Januari 2017

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sidrap mengatakan bahwa :

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Sektor Panca Lautang, sebenarnya masih kurang ini terbukti banyak pengendara baik roda dua maupun roda empat belum menyadari atau mengetahui tentang etika dan tertib berlalu lintas terutama kepada anak-anak di bawah umur atau anak sekolah.³

Dalam rangka penegakan hukum keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) tentunya tidaklah mudah, oleh karena masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut data pelanggaran lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap di wilayah hukum sektor Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016.

Tabel 2

Data Pelanggaran Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas dan Tilang di wilayah
Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap

POLEK	RANMOR		JM L	JENIS PELANGGARAN								BARANG BUKTI			
	R2	R4		C P T	M U A T	B O N C3	KL KP	SRT 2	SB UK	HE LM	L AI N2	R2	R4	SIM	STNK
MARITENGG AE	669	248	917	0	0	0	112	465	48	67	5	338	6	291	282
SIDENRENG	291	91	382	0	0	0	31	308	16	22	3	55	1	120	206
PC. RIJANG	284	84	368	0	0	0	33	242	11	47	2	32	0	118	218
KULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARANTI	234	81	315	0	0	0	30	253	6	23	3	25	2	109	179
WT.PULU	356	124	480	0	0	0	42	384	18	27	2	51	3	173	253
PC.LAUTANG	180	59	239	0	0	0	24	194	5	13	3	18	0	100	121
TL.LIMPOE	193	59	252	0	0	0	32	191	8	18	2	22	0	99	130
DUA PITUE	387	142	529	0	0	0	43	418	18	31	1	49	2	157	321
PITU RIAWA	296	107	403	0	0	0	34	326	15	25	1	44	1	140	219
PITU RIASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	289 0	995	388 5	0	0	0	381	2781	145	273	21	635	15	1307	1929

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

³Zakariah, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sidrap, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2017.

Berdasarkan data pelanggaran di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran di wilayah hukum Sektor Panca Lautang sebanyak 239 pelanggaran masing-masing roda dua berjumlah 180 dan roda empat berjumlah 59, adapun jenis pelanggaran di antaranya kelengkapan berjumlah 24, surat-surat berjumlah 194, sabuk berjumlah 5, helm berjumlah 13, dan lain-lain 3.

Tabel 3

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi di Wilayah Hukum Sektor Panca

Lautang Kabupaten Sidrap

No.	Profesi	Jumlah
1.	PNS	46
2.	Swasta	63
3.	Mahasiswa	27
4.	Pelajar	42
5.	Sopir	29
6.	Pedagang	18
7.	Petani	14

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

Berdasarkan data tersebut, maka data pelanggaran lalu lintas menurut profesi di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang paling banyak dilakukan oleh swasta, selanjutnya disusul oleh pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, pelajar, sopir, mahasiswa, pedagang, dan petani.

Selanjutnya data pelanggaran lalu lintas menurut pendidikan banyak dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan SMA. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Hukum Sektor
Panca Lautang Kabupaten Sidrap

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	38
2.	SMP	69
3.	SMA	86
4.	SARJANA	46

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

Berdasarkan data tersebut bahwa pelanggaran lalu lintas menurut pendidikan di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang, paling banyak dilakukan oleh yang memiliki pendidikan terakhir SMA, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh masyarakat berpendidikan tinggi seperti yang memiliki pendidikan terakhir Perguruan Tinggi.

Tabel 5

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Hukum Sektor
Panca Lautang Kabupaten Sidrap

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	156
2.	Perempuan	83

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

Berdasarkan data tersebut, maka mayoritas pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki.

2. Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang di bawah Polres Sidrap

Kecelakaan di jalan raya umumnya timbul dari pemakai jalan yang menggunakan prasarana jalan tersebut, termasuk seluruh anggota masyarakat. Unsur manusia merupakan unsur yang paling kompleks dan tidak bisa diramalkan dalam kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan hal tersebut, maka tingkah laku dari pribadi pemakai jalan sering merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan karakteristik lalu lintas. Sebagai contoh, di pedesaan di mana orang-orangnya berperilaku tak sabar, ingin menang sendiri, acuh maka perilaku disiplin berkendaraannya banyak yang kurang sehingga terjadi permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan, pelanggaran maupun kemacetan.

Tabel 6

Data Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap di Wilayah hukum sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016

POLSEK	JUMLAH		KORBAN			RUMAT	KET
	LAPOR	SELRA	MD	LB	LR	RP	
MARITENGGAE	59	55	9	6	55	247.400.000	
SIDENRENG	24	22	11	8	17	118.000.000	
PANCA RIJANG	20	19	4	2	19	53.650.000	
KULO	4	3	0	1	5	6.500.000	
BARANTI	13	12	4	3	9	28.400.000	
WATANG PULU	49	45	9	11	30	229.750.000	
PC.LAUTANG	14	12	6	1	13	19.800.000	
TELLU LIMPOE	17	16	3	1	20	13.050.000	
DUA PITUE	19	19	4	2	16	61.150.000	
PITU RIAWA	6	5	4	2	7	15.500.000	
PITU RIASE	1	1	0	0	1	500.000	
JUMLAH	226	209	54	37	192	793.700.000	

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Sidrap pada tahun 2016 sebanyak 226 dan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang pada tahun 2015 sebanyak 20 orang dengan perincian sebagai berikut: korban meninggal dunia berjumlah 6, korban yang mengalami luka berat berjumlah 1, dan yang mengalami luka ringan berjumlah 13. Adapun kerugian materil sebanyak 19.800.000.

Tabel 7

Data Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah hukum sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun 2016

No.	Fokus Penyebab	Tahun 2016
1.	Manusia	11
2.	Teknis Kendaraan	7
3.	Lain-lain	2

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap, 2016

Berdasarkan data penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu manusia. Dengan kata lain karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas tidak semudah yang diharapkan. Banyak faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut seperti halnya yang disampaikan Kapolsek Panca Lautang bahwa:

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap karena tingkat disiplinnya rendah sehingga berkendara tidak sesuai dengan aturan.⁴

Pendapat Kapolsek Panca Lautang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas didukung oleh Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas yang mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang diantaranya faktor manusia yang mengabaikan etika dan tertib berlalu lintas, faktor kendaraan, dan faktor jalan di mana volume kendaraan bertambah sementara jalan sempit.⁵

Masih berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap, tokoh masyarakat di wilayah tersebut mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang diantaranya kurangnya kesadaran hukum pengendara terhadap peraturan lalu lintas, dan juga dari pihak kepolisian kurang melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait tertib berlalu lintas.⁶

Adapun pendapat dari salah satu masyarakat di Kecamatan Panca Lautang mengatakan bahwa:

⁴Jacnes Tatuil, Kapolsek Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 9 Januari 2017.

⁵Zakariah, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Sidrap, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2017.

⁶Sahida, Tokoh Masyarakat Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2017.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor jarak yang ditempuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari di pedesaan tidak begitu jauh sehingga masyarakat melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terlihat bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap yaitu masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan adanya peraturan-peraturan lalu lintas tersebut. Berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat terdapat hubungan yang sangat erat antara faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

Pertama, Faktor hukum (undang-undang). Berkaitan dengan masalah undang-undang atau peraturan dibidang lalu lintas sejak tahun 1992 pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lainnya berkaitang dengan lalu lintas tersebut. Di samping dengan terbitnya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menggantikan kedudukan undang-undang lalu lintas tahun 1992.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas guna mewujudkan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Pasal 68 UU No. 22 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa setiap kendaraan bermotor diwajibkan dengan STNK dan TNKB. Selain itu Pasal 77

⁷Kurnia, Masyarakat Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2017.

mengatur tentang ketentuan bagi pengemudi diwajibkan memiliki SIM. Selanjutnya Pasal 93 ayat (1) manajemen rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dasar hukum lainnya adalah Pasal 105, di mana setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Selanjutnya Pasal 106 mengatur tentang rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, kecepatan kendaraan bagi pengemudi kendaraan bermotor. Dengan demikian maka diharapkan dengan adanya undang-undang lalu lintas yang baru dapat meningkatkan peran Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi petugas Satuan Lalu lintas dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, untuk masalah undang-undang atau peraturan berkaitan dengan masalah lalu lintas penulis rasa sudah cukup, sehingga ruang gerak anggota lalu lintas dalam melaksanakan undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Di samping itu undang-undang yang baru diharapkan dapat membawa efek jera bagi pelanggar lalu lintas karena ancaman hukuman/sanksi lebih berat dibandingkan dengan undang-undang lalu lintas yang lama tahun 1992.

Kedua, Faktor penegak hukum (personel). Pada aspek ini personel merupakan pelaksana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap. Sebagai fungsi pelaksana utama maka Satuan Lalu lintas Polres Sidrap mempunyai personel sebanyak 55 orang dan berdasarkan jumlah tersebut sudah tergolong dengan jumlah personel yang banyak. Oleh karena itu diharapkan dengan dengan jumlah personel sebanyak itu dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Di samping itu juga diharapkan tidak terjadi penyimpangan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap khususnya di wilayah hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap. Sudah semestinya penegakan hukum tersebut dilaksanakan setegas dan setransparan mungkin, mengingat masyarakat sangat kritis terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Ketiga, Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Lalu lintas Polres Sidrap secara umum dapat berjalan dan mendukung pelaksanaan tugas, namun diperlukan penambahan seperti kendaraan roda dua untuk mendukung kegiatan pengaturan dan penjagaan serta patrol yang dirasakan masih kurang, begitu juga dengan alat komunikasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan peran Satuan Lalu lintas maka diperlukan penambahan sarana dan prasarana.

Keempat, Faktor masyarakat. Kondisi masyarakat Kabupaten Sidrap khususnya di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang maka mempengaruhi upaya Satuan Lalu lintas Polres Sidrap dalam meningkatkan kepatuhan hukum berlalu lintas di jalan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu

lintas (Kamseltibcarlantas). Berdasarkan tabel 3 bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh petani dan pedagang juga terlihat di sana. Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas. Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin kepatuhan hukum masyarakat berlalu lintas.

Kelima, Faktor budaya. Faktor budaya masyarakat juga turut mempengaruhi peran Satuan Lalu lintas Polres Sidrap dalam meningkatkan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Misalnya, masyarakat menganggap rambu-rambu lalu lintas bersifat formalitas sehingga masyarakat terkadang melanggar aturan lalu lintas tersebut.

E. *Pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat*

Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam QS al-Nisā/4:59. yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Allah berfirman dalam QS al-Nisā/4:59. tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulilamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Quran*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁸

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah. Salah satu tokoh Agama mengatakan bahwa “Islam mengajarkan kepada aturan pemerintah sebagaimana sebuah landasan bahwa taat pada Allah dan Rasulullah serta para pemimpin”.⁹

Tokoh agama lain juga mengatakan bahwa:

Dalam *al-Qur'an* mengatakan *at{i> 'ulla>ha wa at{i> 'urrasu>la waulilamriminkum* aturan dibuat oleh pemerintah, meskipun bukan langsung perintah Allah tapi ada aturan yang dibuat oleh penguasa yang harus ditaati. Jadi melanggar aturan termasuk dosa karena aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.¹⁰

Dari kedua pandangan tersebut kaitannya dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. QS al-Isrā/17:33 di mana dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri.

Maslahah yang merupakan tujuan Tuhan dalam *syariat-Nya* itu mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpa *maslahah*, terutama yang bersifat *dharuriyah*, meliputi lima hal: pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Wali, 2014), h. 87.

⁹Ali Rusli, Tokoh Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 10 Januari 2017.

¹⁰Sanosi Ismail, Tokoh Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Wawancara oleh penulis, 12 Januari 2017.

sedemikian penting karena merupakan maslahat yang dipelihara dalam segenap Agama.¹¹

Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas tersebut, yakni untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak *mudharat*. Untuk itu seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan menaati pemimpin/pemerintah, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹²

Seluruh tuntutan agama adalah untuk *kemaslahatan* hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kamahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kamahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah swt.¹³



¹¹Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), h. 48.

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 502.

¹³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang penulis kemukakan pada bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran lalu lintas, profesi, pendidikan dan jenis kelamin merupakan penggambaran umum tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang. Jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang tahun 2016 sebanyak 239 pelanggaran dengan jumlah paling banyak dilakukan oleh laki-laki yang mayoritas berprofesi swasta dengan berpendidikan SMA. Data kecelakaan lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap di wilayah hukum Sektor Panca Lautang tahun 2016 sebanyak 20 orang masing-masing meninggal dunia sebanyak 6 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 13 orang;
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah perkampungan khususnya di wilayah hukum sektor kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap yaitu, pertama faktor pengguna jalan dalam hal ini yaitu manusia yang tidak patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan kata lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, selain itu juga adanya pemikiran masyarakat di daerah perkampungan bahwa jarak yang di tempuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak begitu jauh sehingga melanggar peraturan lalu lintas merupakan hal yang biasa, seperti hal-hal yang nampak misalnya tidak menggunakan helm, dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Kedua, aparat penegak hukumnya di mana berada

ditangan para kepolisian yang kurang melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan dan kelancaran berkendara;

3. Pandangan Islam terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu wujud dari ketidaktaatan terhadap pemerintah dimana bertentangan dengan QS al-Nisā/4:59. tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah. Selain itu salah satu akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas yaitu dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa sehingga bertentangan dengan QS al-Isrā/17:33. di mana dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Adapun maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas, yakni untuk tercapainya kemaslahatan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan atas hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka ada beberapa implikasi yang dapat diberikan penulis guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Sektor Panca Lautang sebagai berikut :

1. Penegak hukum yaitu pihak kepolisian seharusnya lebih berperan aktif dalam hal melakukan penertiban lalu lintas. Selain itu juga diharapkan dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi diberbagai pihak terkait pentingnya taat dan patuh terhadap aturan lalu lintas sehingga jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Kecamatan Panca Lautang akan mengalami penurunan setiap tahunnya;

2. Pihak pengguna jalan diharapkan untuk mengetahui tentang etika dan tertib berlalu lintas yang baik dan benar serta patuh terhadap aturan yang ada demi keselamatan berlalu lintas sehingga kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kecamatan Panca Lautang dapat dikurangi.



KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Al-Islam*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chambliss, William J. *Toward A Radical Criminology*, dalam David Kairys, ed., *The Political Of Law. A. Progressive Critique*. New York: Pantheon Books, 1890.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hagan, Frank E. *Introduction to Criminology*. America: Reprinted, 1889.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000.
- Kementrian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Selatan: Wali, 2014.
- Kusumah Wilyana W. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico, 1999.
- Lubis, Ibrahim. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaka, 2009.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Noach, W. M. E. Terj. J. E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Putranto, Leksmono Suryo. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Indeks, 2016.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada, 2005.
- Unal, Ali. Terj. Sugeng Hariyanto, Fathor Rasyid. *Makna Hidup Sesudah Mati*. Cet. 1; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Pratiwi, Putu Willy Oki “*pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh siswa sekolah menengah pertama*,” vol 2, No.1 (2014),h.1<http://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/JJPP/article/view/3546> (Diakses 10 November 2016)
- Sari, Faramita Nuriya “*Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda*,” Ilmu Administrasi Negara,vol.no.3(Agustus2016),h.1.[http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/E%20journal%20Faramita%20\(08-28-16-22-05\).pdf](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/E%20journal%20Faramita%20(08-28-16-22-05).pdf) (Diakses 10 November 2016)



L A M P I R A N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan/ Pedoman Wawancara

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)

Informan : Kapolsek Panca Lautang

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesedian Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)

Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif

Metode Penelitian : Penelitian Lapangan

Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang

Subjek Penelitian : Kapolsek Panca Lautang

Hari/Tanggal/Jam :

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kapolsek Panca Lautang?
2. Bagaimana situasi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang? (KAMTIBMAS)
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Menurut Bapak apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat?
5. Jenis Pelanggaran lalu lintas apa yang paling sering terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
6. Adakah data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
7. Adakah data pelaporan kegiatan penertiban oleh para anggota satuan kepolisian lalu lintas?
8. Bagaimana harapan Bapak terhadap kondisi lalu lintas yang ada di wilayah hukum sektor Panca Lautang ke depannya?

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)**

Informan : Kasat Lantas Polres Sidrap

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)
Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian : Penelitian Lapangan
Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang
Subjek Penelitian : Kasat Lantas Polres Sidrap
Hari/Tanggal/Jam :

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Sidrap?
2. Bagaimana menurut Bapak mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Jenis-jenis Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
5. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
6. Adakah data yang dihasilkan oleh satuan polisi lalu lintas berkaitan dengan pembinaan masyarakat terkait peraturan lalu lintas?
7. Bagaimana harapan Bapak terhadap kondisi lalu lintas yang ada di wilayah hukum sektor Panca Lautang ke depannya?

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)**

Informan : Kanit Laka Lantas Polres Sidrap

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)
Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian : Penelitian Lapangan
Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang
Subjek Penelitian : Kanit Laka Lantas Polres Sidrap
Hari/Tanggal/Jam :

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kanit Laka Lantas Polres Sidrap?
2. Bagaimana menurut Bapak mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Jenis-jenis Pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
5. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
6. Adakah data yang dihasilkan oleh satuan polisi lalu lintas berkaitan dengan pembinaan masyarakat terkait peraturan lalu lintas?
7. Bagaimana harapan Bapak terhadap kondisi lalu lintas yang ada di wilayah hukum sektor Panca Lautang ke depannya?

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)**

Informan : Tokoh Masyarakat

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)
Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian : Penelitian Lapangan
Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang
Subjek Penelitian : Tokoh Masyarakat
Hari/Tanggal/Jam :

1. Bagaimana keadaan umum wilayah Kecamatan Panca Lautang?
2. Masalah-masalah apa saja yang terjadi berhubungan dengan gangguan lalu lintas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terkait dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut?
5. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
6. Menurut pendapat Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah ini?
7. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mewujudkan lalu lintas aman, selamat, tertib, dan lancar?

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)**

Informan : Tokoh Agama

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)
Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian : Penelitian Lapangan
Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang
Subjek Penelitian : Tokoh Agama
Hari/Tanggal/Jam :

1. Bagaimana keadaan umum wilayah Kecamatan Panca Lautang?
2. Masalah-masalah apa saja yang terjadi berhubungan dengan gangguan lalu lintas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Lalu lintas tersebut?
5. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat yang terjadi dari pelanggaran lalu lintas tersebut?
7. Bagaimana Islam memandang terkait adanya pelanggaran tersebut?
8. Bagaimana Hukumnya orang yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tersebut?
9. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap kondisi Lalu lintas di wilayah Sektor Panca Lautang ke depannya?

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DI PEDESAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang)**

Informan : Masyarakat

Kepada Yth, Bapak/Ibu, Saudara(i) Informan yang telah bersedia menjawab pertanyaan ini

Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sedang mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap”. Penelitian ini merupakan bahan skripsi guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Maka saya sebagai peneliti ingin meminta bantuan saudara(i) sebagai Informan untuk membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/ibu, saudara(i) menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pancang Lautang Kabupaten Sidrap)
Jenis Penelitian : Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian : Penelitian Lapangan
Lokasi Penelitian : Sektor Panca Lautang
Subjek Penelitian : Masyarakat
Hari/Tanggal/Jam :

1. Bagaimana keadaan umum wilayah Kecamatan Panca Lautang?
2. Masalah-masalah apa saja yang terjadi berhubungan dengan gangguan lalu lintas?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terkait dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut?
5. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum Sektor Panca Lautang?
6. Menurut pendapat Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah ini?
7. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mewujudkan lalu lintas aman, selamat, tertib, dan lancar?

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kapolsek Panca Lautang Kabupaten Sidrap AKP Jagnes Tatuil



Wawancara dengan Kanit Laka Lantas Polres Sidrap Iptu Zakariah, SH



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Drs. Muhammad Basir, M.Si



Wawancara dengan Tokoh Agama Sanosi Ismail



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

6/3-2017

18/01/10

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **ERIKA FITRIANI, NIM: 10300113110**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Perkampungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)"*. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 1 Maret 2017

Pembimbing I



Subehan Khalik, S. Ag., M. Ag

Nip. 19701018 199703 1 002

Pembimbing II



Rahmiati, M.Pd

Nip. 19771001 200901 2 005

ASLI

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAERAH SULAWESI SELATAN
'RESORT SIDENRENG RAPPANG
Jalan Bau Massepe No.1 Pangkajene Sidrap 91611



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP/ 22 / I / 2017 / Lantas

-----Yang bertanda tangan dibawah ini :

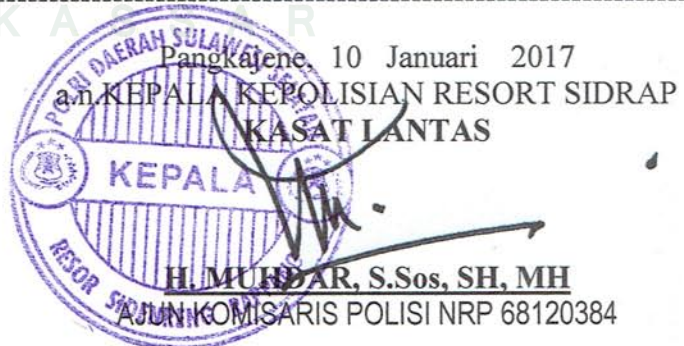
1. Nama : H. MUHDAR, S.Sos, SH, MH
2. Pangkat / Nrp : AKP / 68120384
3. Jabatan : KASAT LANTAS
4. Kesatuan : POLRES SIDRAP

-----Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sbb :

1. Nama : ERIKA FITRIANI
2. Nim : 10300113110
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
4. Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
5. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR

-----Telah selesai melakukan penelitian di Satlantas Polres Sidrap selama 2(dua) hari terhitung mulai tanggal 09 s/d 10 Januari 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI DAERAH PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DIWILAYAH HUKUM SEKTOR PANCA LAUTANG KAB.SIDRAP)”-----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-----





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN PANCA LAUTANG

Jl. Bau Massepe No. 91 Telp. (0421) 3580751 Kode Pos 91672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 500/006 /Umum

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUHAMAD BASIR, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Camat Panca Lautang
Alamat : Jl. Poros Soppeng, Kel. Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

1. Nama : **ERIKA FITRIANI**
2. Nim : 10300113110
3. Fakultas : Syariah dan Hukum
4. Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Guna melaksanakan penelitian terhitung mulai tanggal 27 Desember sampai 17 Januari 2017, dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul skripsi sebagai berikut :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
DIDAERAH PERKAMPUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI WILAYAH HUKUM SEKTOR PANCA LAUTANG KAB. SIDRAP)**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bilokka, 11 Januari 2017



**An. C A M A T,
Sekcam**

Drs. MUHAMMAD BASIR, M.Si
NIP. 19680707 199010 1 002

RIWAYAT HIDUP



Erika Fitriani lahir di Sidrap tanggal 18 Mei 1995, anak dari pasangan Abd.Fatta dan Hasnawati. Beralamat di Jalan Poros Soppeng kabupaten Sidrap. Riwayat Pendidikan : Masuk Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SD Inpres Negeri 1 Barru hingga tahun 2005, dan pindah di SD Inpres Karema Kabupaten Mamuju. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Mamuju hingga tahun 2010. Kemudian terdaftar sebagai siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 MAMUJU pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 diterima sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Alauddin Makassar (UINAM) pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan tahun 2017 menyelesaikan Studi dengan judul skripsi : “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap)”.